



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PASAMAN**

## **SKRIPSI**



**YULIANDRY  
1110511006**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

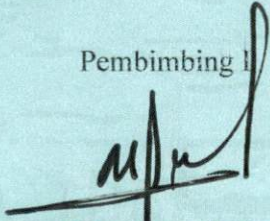
Dengan ini dinyatakan bahwa

Nama : Yuliandry  
No. BP : 1110511006  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks  
Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

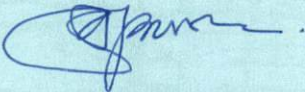
Telah di uji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 26 September 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Payakumbuh, 26 September 2015

Pembimbing I

  
**Drs. Masrizal, M. Soc, Sc**  
NIP. 195802111987021003

Pembimbing II


  
**Syaiful Anwar SE, M. Si**  
NIP. 197607282010121002

Mengetahui

Koordinator  
FEUA Kampus II Payakumbuh

  
**Lukman, SE, M. Si**  
NIP. 196411231993031003



	No. Alumni Universitas	YULIANDRY	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/ tanggal lahir: Medan/ 20 Juli 1992, b). Nama Orang Tua: Syaiful Masrul, Bsc dan Yulmawarni, c). Fakultas: Ekonomi, d). Jurusan: Ilmu Ekonomi, e). No. BP: 1110511006, f). Tanggal Lulus: 26 September 2015, g). Predikat Lulus: Memuaskan, h). IPK: (3,01), i). Lama Studi: 4 Tahun 2 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jln. H. Adam Malik No. 117 Ambacang Anggang, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.		

***Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia  
Di Kabupaten Pasaman***

***Skripsi oleh : Yuliandry***

***Pembimbing 1: Drs. Masrizal, M. Soc., Sc***

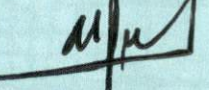


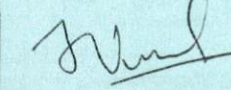
***Pembimbing 2: Syaiful Anwar, SE., M. Si***

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut deret waktu (*time series*) dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan penambahan anggaran bidang kesehatan oleh pemerintah belum mampu berpengaruh terhadap IPM sedangkan variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Di antara beberapa variabel tersebut, variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Pasaman dengan nilai koefisien sebesar 2,565.

Kata kunci: *IPM, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin.*

Skripsi ini telah dipertahankan dan dinyatakan lulus pada tanggal: 26 September 2015. Abstrak telah disetujui oleh Pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan				
Nama	Drs. Masrizal, M. Soc., Sc	Syaiful Anwar, SE., M. Si	Dra. Leli Sumarni, M. Si	Weriantoni, SE., M. Sc

Mengetahui,

Koor. FEUA II payakumbuh : **Lukman SE., M. Si**  
NIP: 196411231993031063

  
Tanda Tangan

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Ketika kita mengeluh: "Tak mungkin"*

*Ingat Allah berfirman: "Jika Allah mengkehendaki sesuatu,*

*Cukup berkata jadi maka jadilah"*

*(Qs. Yasin: 82)*

*Ketika kita mengeluh: "Saya terlalu lelah"*

*Allah berfirman: "Aku ciptakan tidurnmu untuk istirahatmu"*

*(Qs. An-Naba: 9)*

*Ketika kita mengeluh: "Saya tidak mampu"*

*Allah menjawab: "Aku tidak membebankan sesuatu pada*

*Seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya"*

*(Qs. Al-Baqarah: 286)*

*Ketika kita mengeluh: "Saya stress"*

*Allah menjawab: "Hanya dengan mengingat Allah*

*Maka hati akan menjadi tenang"*

*(Qs. Ar-ro'du: 28)*

*Ketika kita mengerut: "Tak ada gunanya"*

*Allah menjawab: "Maka barang siapa yang*

*Mnegerjakan amal kebaikan seberat dzarah,*

*Niscaya ia akan melihat kebaikan"*

*(Qs. Al-zalzalah: 7)*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tercinta Papa (Syaiful Masrul, Bsc), Mama (Yulmawarni), Kakek (Amir Hakim.S.), Nenek (Yulinar), Papa (Jasman.D. SH), dan semua keluarga besar Amir Hakim.S.



## PERNYATAAN

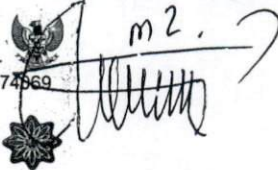
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan adalah hasil karya saya sendiri. Skripsi ini belum pernah disampaikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang sama ditulis atau diteritkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Payakumbuh, 26 September 2015

METERAI  
TEMPEL

60F78ADF369074569

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

m 2. 7  


YULIANDRY

BP: 1110511006



## KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari terbatasnya kemampuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Bagaimanapun juga penulis tetap berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Masrizal, M. Soc., Sc selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Syaiful Anwar, SE, M., Si selaku pembimbing II yang selalu sabar membimbing, memberikan motivasi dan solusi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.



3. Ibu Dra. Leli Sumarni, M.S., M., Si dan Bapak Weriantoni, SE, M., Sc selaku dosen penguji pada seminar hasil.
4. Bapak Lukman, SE, M., Si selaku koordinator Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu Staf Dosen Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama masa kuliah.
6. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan Kampus II Payakumbuh.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syaiful Masrul, Bsc dan Ibunda Yulmawarni, terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini, serta limpahan doa yang selalu ayah dan ibu mohonkan akhirnya dapat mengantrakan saya untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Andalas ini.
8. Untuk keluarga tercinta kakek, nenek, papa Jasman, ma puak, bunda Wetty, kak Rita, kak Rini, da Wan, Afra, Afis, Adit, Aulia, Syifa, Aqnes, Dilla dan Vio terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan.
9. Untuk para sahabat sehatiku yang sama-sama merasakan pahit dan manisnya hidup di perantauan: Petro Cheli, Hidayat Candra, Embri, Wanda Pratama, dan Ifdil Devila Novendri semoga kita bisa bersahabat selamanya dan dapat bertemu kembali.
10. Untuk para sahabatku yang seperjuangan: Vemil Amri, Muhamad Irsyad, M. Raja Habibullah, Fauzan, Heru Fomaihadi, Ilham Maulana, Syukri Nan Diminta, Diego Wiaputra dan Agung Perdana Putra.



11. Sahabat-sahabat IE 011 yang ingin saya sebutkan namanya satu- persatu:

Heru, Dayat, Pero, Debi, Uwi, Habib, Memel, Dela, Ilham, Selfi, Embri, Susan, Keke, Agung, Putriana, Aulia, Ifdil, Rahma, Lusi, Liza, Mona, Wanda, Fani, Opi, Rega, Agung, Lian, Ami, Susan, Bayu, Via, Vemil, Kevin, Irsad, Yesi, Lilian, Reni, Rega, Rizky, Hijrah, Ratna, dan Bram.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Payakumbuh, 26 September 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuliandry', with a stylized flourish at the end.

YULIANDRY



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	13
2.1.2. Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik.....	21
2.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Horod-Domar.....	22
2.1.3.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neo-Klasik.....	23



2.1.3.4 Pertumbuhan Ekonomi Endogen.....	25
2.1.4. Kemiskinan.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Konseptual.....	32
2.4. Hipotesis.....	33
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2. Deskripsi Data dan Variabel Penelitian.....	35
3.3. Metode Analisis Data.....	36
3.4. Pengujian Hipotesis.....	38
3.4.1. Uji Regresi.....	38
3.4.2. Uji Asumsi Klasik.....	40
 BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Kabupaten Pasaman.....	43
4.1.1. Gambaran Geografis.....	43
4.1.2. Gambaran Demografi.....	45
4.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	46
4.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	48
4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	50
4.5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	53
4.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin.....	55



## BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Data.....	58
5.1.1. Analisis Model Regresi.....	58
5.1.1.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
5.1.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	60
5.1.1.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	61
5.2. Pembahasan.....	65
5.3. Uji Asumsi Klasik.....	71
5.3.1. Uji Multikolinearitas.....	71
5.3.2. Uji Heteroskedastisitas.....	73
5.3.3. Uji Autokorelasi.....	75
5.3.4. Uji Normalitas.....	76
5.3.5. Uji Linearitas.....	78
5.4. Implikasi Kebijakan.....	79

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran.....	85

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Adiministratif Kabupaten Pasaman.....	44
Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	47
Tabel 4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	49
Tabel 4.5. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	51
Tabel 4.6. Perkembangan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi.....	54
Tabel 4.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin.....	56
Tabel 5.1. Hasil Regresi .....	62
Tabel 5.2. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Melihat nilai Tolerance dan VIF.....	72
Tabel 5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser.....	74
Tabel 5.4. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Runs Test.....	75
Tabel 5.5. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov.....	78
Tabel 5.6. Hasil Uji Linieritas dengan Ramsey.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	32
Gambar 5.1. Uji F Variabel Secara Simultan.....	61
Gambar 5.2. Hasil Uji t Pada Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	63
Gambar 5.3. Hasil Uji t Pada Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan. ....	63
Gambar 5.4. Hasil Uji t Pada Pertumbuhan Ekonomi.....	64
Gambar 5.5. Hasil Uji Pada Jumlah Penduduk Miskin.....	65
Gambar 5.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	73
Gambar 5.7. Hasil Uji Normalitas Dengan Analisis Grafik.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Human Development Index (HDI)* diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. Menurut UNDP, HDI atau IPM diterjemahkan dalam Arsyad (2010) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas (derajat perkembangan manusia) dari hasil pembangunan ekonomi. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati satu maka dapat dikatakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik sebaliknya apabila angka IPM semakin menjauhi satu maka dikatakan indikasi pembangunan manusia yang semakin buruk atau rendah, namun untuk memudahkan dalam analisa biasanya dikalikan 100. IPM menggunakan ukuran sosial ekonomi yang lebih komprehensif dari pada GNP dan memungkinkan untuk membandingkan negara dengan cara yang berbeda (Arsyad, 2010). Terdapat beberapa pendekatan untuk mengukur besaran IPM.

Menurut Kuncoro (2004) terdapat beberapa komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Komponen penyusun IPM tersebut antara lain adalah komponen kesehatan diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup, komponen pengetahuan atau pendidikan diukur dengan indikator tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta komponen standar hidup layak diukur dengan menggunakan indikator konsumsi riil perkapita. Selain itu indikator pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin juga ikut berpengaruh terhadap IPM pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian pemerintah sangat berperan dalam mempengaruhi nilai IPM di suatu wilayah.

Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara atau daerah menjadi sangat penting ketika gagalnya mekanisme pasar bagi kaum kapitalis yang tidak menghendaki campur tangan pemerintah yang ditandai dengan sering munculnya krisis ekonomi (Jhingan, 2012). Oleh sebab itu Keynes menyarankan perlunya peran negara berupa regulasi dan kebijakan fiskal untuk mencapai kemakmuran suatu negara (Kuncoro, 2010). Kebijakan tersebut antara lain perencanaan dan penganggaran pembangunan berupa pengeluaran untuk bidang-bidang yang mempengaruhi IPM.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di suatu daerah. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah bukan bertumpu pada swasta. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah di sektor tersebut maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia, selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.

Menurut Todaro (2009) kenaikan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan mengakibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga akan berdampak pada peningkatan produktifitasnya. Artinya kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan IPM.

Usaha untuk meningkatkan IPM tidak hanya berhenti pada usaha peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan saja. Terdapat

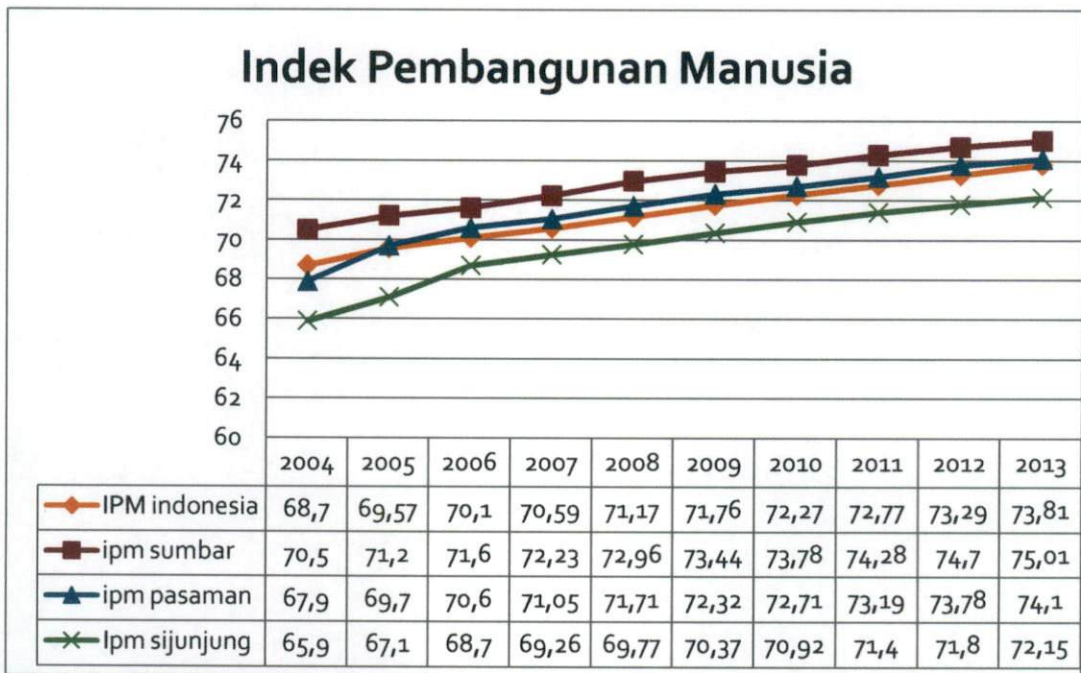


permasalahan lain yang juga membutuhkan perhatian yaitu masalah pertumbuhan ekonomi atau masalah rendahnya produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas masyarakat secara akumulatif pasti akan berimbas pada pencapaian PDB (*Produk Domestik Bruto*) atau memperlambat akselerasi pertumbuhan yang berujung pada rendahnya pembangunan manusia. Jika dilihat pada tatanan masyarakat daerah, tingkat produktivitas dapat dilihat dari nilai PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*). Selain itu ada lagi faktor yang ikut mempengaruhi IPM diantaranya jumlah penduduk miskin.

Kondisi sosial ekonomi (jumlah penduduk miskin) juga mempengaruhi IPM, apabila jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM (Kuncoro, 2004). Hal ini disebabkan oleh penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas manusia memburuk (Trimaryani, 2009). Meier dan Baldwin mengemukakan bahwa dalam teori lingkaran perangkap kemiskinan, jumlah penduduk miskin akan menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat. Tingkat produktivitas yang rendah yang terlihat dari ketidakmampuan mengarahkan tabungan yang cukup mengakibatkan tingkat penanaman modal yang rendah dan akan menyebabkan rendahnya pendidikan, kesehatan dan kemahiran masyarakat yang menurunkan kualitas manusia dan pada akhirnya juga akan mengakibatkan produktivitas semakin rendah (Subandi, 2012). Oleh karena itu kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mirza (2012) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan merupakan faktor penyebab terbesar penurunan IPM.

Kondisi atau angka IPM itu bisa berubah setiap waktu. Berikut merupakan gambaran Indek Pembangunan Manusia di Indonesia, Sumatra Barat, Pasaman dan Sijunjung dalam kurun waktu 2004-2013:

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Indek Pembangunan Manusia**  
**Tahun 2004-2013**



Sumber: BPS Sumatra Barat 2004-2013

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat IPM di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun 2004-2013. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,79%. Walaupun IPM mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, akan tetapi laju pertumbuhan IPM Indonesia tidak secepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat mencapai sebesar 5,80% (BPS Indonesia). Dengan perbedaan nilai yang besar tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Dalam arti lain pembangunan Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya.



Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di negara Indonesia. Tingkat perkembangan IPM di Sumatra Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,68% dalam kurun waktu 2004-2013. Dapat dilihat dari Gambar 1.1 bahwa, pada tahun 2004 IPM Sumatra Barat adalah sebesar 70,5 kemudian menjadi 75,01 pada tahun 2013. Capaian pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,01%, sedangkan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,41%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia, maka pertumbuhan IPM Sumatra Barat ini masih berada dibawah, dengan perbedaan sebesar 0,11%.

Dengan berlakunya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka daerah otonomi diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan pembangunan daerah atas dasar potensi yang dimiliki daerah yang mengartikan secara langsung maju mundurnya suatu daerah sangat ditentukan oleh komponen masyarakat atau manusia pada daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah yang tergabung dalam Propinsi Sumatra Barat yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan dan menciptakan pertumbuhan IPMnya sendiri. Kabupaten ini termasuk salah satu kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2004 bersama Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa

tingkat IPM di Kabupaten Pasaman selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini terbukti pada tahun 2004 IPM Kabupaten Pasaman adalah sebesar 67,9 dan menjadi 74,10 pada tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,97%. Nilai pertumbuhan IPM tiap tahunnya di Kabupaten Pasaman masih sama dengan pertumbuhan IPM Indonesia dan Sumatra Barat dimana selalu menunjukkan keadaan yang berfluktuasi. Pada tahun 2005 nilai pertumbuhan IPM adalah sebesar 2,65%, tahun ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi yang diperoleh oleh Kabupaten Pasaman. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,43% (BPS, 2014).

Jika dibandingkan dengan tingkat IPM Kabupaten Sijunjung yang sama-sama merupakan daerah kabupaten yang di pecah menjadi dua bagian pada tahun 2004 akibat adanya Otonomi Daerah maka tingkat perkembangan IPM di Kabupaten Pasaman lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dari Gambar 1.1. bahwa IPM di Kabupaten Sijunjung hanya sebesar 65,9 pada tahun 2004 dan menjadi 72,15 pada tahun 2013. Angka ini berada dibawah angka yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman. Namun secara rata-rata pertumbuhan IPM di Kabupaten Sijunjung lebih besar dan lebih cepat dari pada pertumbuhan IPM di Kabupaten Pasaman yaitu sebesar 1,00%, Dengan perbedaan sebesar 0,03%. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan manusia di Kabupaten Pasaman lebih lambat dibandingkan Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2004-2013 (BPS, 2014).

Hasil penjabaran Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman memperlihatkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tahun 2004-2013 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun cenderung memperlihatkan tren yang



menurun. Hal ini dibuktikan dengan nilai penurunan rata-ratanya sebesar -4,82%. Tercatat terdapat dua kali penurunan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman, yaitu pada tahun 2005 pengeluaran menjadi Rp. 64.646.492.639 dan mengalami penurunan kedua kalinya pada tahun 2009 menjadi Rp. 144.404.856.985. Selain itu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di daerah Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman tidak sesuai dengan teori Todaro. Dimana, penurunan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tetap meningkatkan IPM (DPP-KAD, 2014).

Begitu juga hasil Laporan Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman memperlihatkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tahun 2004-2013 juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tercatat mengalami dua kali penurunan pengeluaran yaitu pada tahun 2005 menjadi Rp. 9.626.169.039 dan tahun 2011 menjadi Rp. 1.867.678.000, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pengeluaran bidang kesehatan adalah sebesar 20,53%. Namun selain tahun 2005 dan tahun 2011 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di daerah Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak sesuai dengan teori Todaro. Dimana pengeluaran pemerintah yang berfluktuasi tetap meningkatkan IPM di Kabupaten Pasaman (DPP-KAD, 2014).

Selanjutnya data publikasi dari BPS memperlihatkan nilai pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di Kabupaten Pasaman selalu mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2004 sampai

2013 tetapi secara keseluruhan cenderung memperlihatkan tren yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai pertumbuhan PDRB pada tahun 2004 adalah sebesar 5,26% dan menjadi 6,13% pada tahun 2013, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata adalah sebesar 5,93%. Tercatat pertumbuhan PDRB mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu menjadi 6,13%. Namun selain tahun tersebut Pertumbuhan PDRB selalu mengalami peningkatan. Hal ini diduga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh (2013), dimana penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Pasaman

Serta data kemiskinan Sumatera Barat secara keseluruhan dari tahun 2004-2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman cukup tinggi dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan cenderung memperlihatkan tren yang selalu menurun. Tercatat hanya terjadi satu kali peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman yaitu pada tahun 2006 menjadi 45.600 orang, dan selain tahun 2006 selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata jumlah penurunan adalah sebesar 10,41%. Akan tetapi, penambahan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Kabupaten Pasaman tetap menunjukkan peningkatan terhadap IPM. Hal ini diduga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fenomena dengan teori perangkap kemiskinan yang dikemukakan oleh Meier dan Baldwin.

Dari uraian dapat dilihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan IPM di Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Masing-masing variabel memperlihatkan adanya fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Dapat dilihat bahwa,



fluktuasi yang terjadi pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan juga dapat meningkatkan IPM di kabupaten Pasaman. Sedangkan menurut teori hanya penambahan pengeluaran pemerintah saja yang dapat menciptakan pertumbuhan atau peningkatan IPM. Penambahan jumlah penduduk miskin dapat menciptakan peningkatan IPM di Kabupaten Pasaman, hal ini juga berlawanan dengan teori yang menyebutkan bahwa hanya pengurangan jumlah penduduk miskin yang dapat meningkatkan IPM. Serta penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman juga dapat menciptakan peningkatan IPM, sedangkan teori mengatakan hanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peningkatan IPM.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diteliti lebih mendalam tentang bagaimana perkembangan dan seberapa besar pengaruh yang diberikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Kabupaten Pasaman dari tahun 2004-2013. Sehingga dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi IPM di Kabupaten Pasaman ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah

penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013.
2. Untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi. Selain itu dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.
2. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah Indeks Pembangunan Manusia.



4. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penelitian, yaitu waktu penelitian (*times series*) yang digunakan dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dan daerah penelitian adalah Kabupaten Pasaman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indek Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. |
| BAB II  | Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.                                      |
| BAB III | Metodelogi penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai data, model analisis, kerangka konseptual, dan definisi operasioanl variabel.                            |

- BAB IV            Gambaran umum objek penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis, dan demografi Kabupaten Pasaman, indek pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman.
- BAB V            Temuan empiris dan implikasi kebijakan, dalam bab ini diuraikan mengenai penemuan empiris dan implikasi kebijakan.
- BAB VI            Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan pada bab V dan saran yang diberikan dari penelitian tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Indek Pembangunan Manusia

Pembangunan merupakan upaya atau proses untuk melakukan perubahan yang lebih baik yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2009). Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah bisa dilihat dengan dua indikator yaitu indikator ekonomi dan non ekonomi (Subandi, 2010). Indikator ekonomi terdiri dari Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) dengan laju pertumbuhan ekonomi dan *Gross Domestic Bruto* perkapita dengan *Purchasing Power Parity* (PPP). Sedangkan indikator non ekonomi terdiri dari *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI).

Menurut UNDP pada tahun 1990 pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) diterjemahkan dalam Arsyad (2010) adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat perkembangan manusia) dari hasil pembangunan ekonomi. *Human Development Index* diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia menggunakan ukuran sosial ekonomi yang lebih komprehensif dari pada GNP dan memungkinkan untuk membandingkan negara dengan cara yang berbeda (Arsyad, 2010).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam prespektif pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukanlah

tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat mencapai tujuan akhir yaitu memperluas pilihan-pilihan manusia menjadi sebanyak-banyaknya (Todaro, 2009).

Pada tahun 1990, UNDP mengatakan angka Indeks Pembangunan Manusia berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara ke dalam tiga golongan, yaitu (Arsyad, 2010):

1. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bisa memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
2. Kelompok negara dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*), bisa memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79.
3. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bisa memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

*HDI* atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks gabungan dari tiga indikator : *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi melek huruf penduduk dewasa (berbobot tiga perempat), dan gabungan dari rasio pendidikan primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga), dan standar hidup layak (*decent standard fo living*) sebagaimana diukur oleh PDB riil perkapita (Todaro, 2009).

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga IPM diperoleh dengan rata-rata masing masing indeks yang akan bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya ini dikalikan 100 (Kuncoro, 2004).



Menurut Kuncoro (2004) terdapat tiga komponen penyusun Indeks Pembangunan manusia yang bisa diperoleh dari data BPS, terutama dari; SUSENAS, Statistik Indonesia setiap tahun untuk informasi inti dan Modul Konsumsi setiap tiga tahun untuk informasi konsumsi. Adapun komponen penyusunnya yaitu ;

- a. Komponen *Longevity* diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup. Dalam laporan ini, harapan hidup di Indonesia dan Provinsi/kabupaten atau kota dihitung dengan menerapkan metode tidak langsung (Metode Brass, varian dari Tussel) berdasarkan variabel rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlah rata-rata anak yang tetap hidup
- b. Komponen pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu: tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah (Subandi, 2010). Indikator melek huruf adalah jumlah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebagai persentase terhadap jumlah total penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih . Indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan oleh penduduk berusia 15 tahun atau lebih, dihitung dengan memasukkan dua variabel yaitu: gelar yang telah dicapai dan pencapaian tingkat pendidikan.
- c. Komponen standar hidup layak diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan. UNDP menggunakan PDB per Kapita dengan menghitung paritas daya beli (PPP US\$) sebagai perbandingan internasional komponen ini .

### 2.1.2 Pegeluaran Pemerintah

*Private market* biasanya mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien melalui mekanisme pasar, apabila tingkat efisiensi swasta benar-benar terjadi maka peran pemerintah akan sangat terbatas salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam *private market* (Samuelson dan Nordhaus, 1999).

Ketika konsumen dan produsen tidak lagi mau menanggung biaya atau menghasilkan keuntungan secara penuh dari transaksi yang mereka lakukan maka dikatakan telah terjadi kegagalan pasar. Tiga sumber dari kegagalan yang paling utama menurut Kuncoro (2010) adalah masalah eksternalitas, *lack of private right*, dan adanya barang publik. Masalahnya adalah swasta dan individual-individual tidak mempunyai dorongan untuk mengoreksi kegagalan tersebut dan pada akhirnya peran pemerintah yang akan masuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegagalan pasar memberikan satu pembenaran atas intervensi pemerintah dalam perekonomian menurut Keynes (Samuelson dan Nordhaus, 1999). Adapun intervensi pemerintah salah satunya adalah kebijakan Fiskal dengan Pengeluaran pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 1999).

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (Sukirno, 2004). Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno, 2004).



Kurniawaan dalam Sitaniapessy (2013) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan persarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya.

Defenisi belanja menurut peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menti Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi Belanja langsung dan tidak langsung. Dimana terdapat pembagian berdasarkan urusan/ organisasinya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Terdapat 26 urusan wajib diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain, serta 6 urusan pilihan yaitu, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan pariwisata, urusan kelautan dan Perikanan, urusan perdagangan dan perindustrian.

Professor Lewis yang mengemukakan mengenai pembangunan ekonomi, menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil maju tanpa dorongan positif dari pemerintah yang cakap (Jhingan, 2012). Ia mengemukakan bahwa tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong pembangunan ekonomi. Pengeluaran negara untuk overhead sosial dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas perekonomian. Pengeluaran pemerintah untuk overhead sosial seperti pendidikan,

kesehatan masyarakat, perumahan murah dan sebagainya akan membuat rakyat menjadi lebih sehat dan efisien. Negaralah yang menciptakan “keterampilan penting” yang diperlukan pembangunan melalui investasi modal manusia (Jhingan, 2012).

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada IPM sangat tergantung kepada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang pembangunan (Djohodipuro, 2008). Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut (Djohodipuro, 2008).

Menurut UNDP-BPS-Bappenas (2013) mengatakan bahwa peranan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah (APBN) turut berperan dalam peningkatan pembangunan manusia.

Menurut teori human capital dalam Todaro (2009) menyatakan kenaikan investasi di bidang pendidikan mengakibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga akan meningkatkan produktivitas. Begitu juga untuk kesehatan, kenaikan investasi di bidang kesehatan juga mengakibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga akan meningkatkan produktivitas.

Nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah negara atau daerah terkait dengan aspek pembangunan manusia (Arsyad, 2010). Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi anggaran



pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut akan meningkatkan pembangunan manusia (Arsyad, 2010).

### **2.1.3 Petumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro (2009), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian mengalami peningkatan dari waktu ke waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi menurut (Arsyad 2004), diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Sedangkan menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan apatis produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro dan Smith, 2006).

Prasetyo (2009) menyatakan istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu negara khususnya bagi negara yang sedang berkembang. Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, indikator pertumbuhan ekonomi dianggap memenuhi syarat untuk menjelaskan dengan baik.

Menurut Sukirni (2006), pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktifitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode tertentu. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat di ukur dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Sukirno, 2012).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian (Todaro, 2006). Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

- g : Pertumbuhan ekonomi (persen)
- Yt : PDRB tahun sekarang (rupiah)
- Yt-1 : PDRB tahun sebelumnya (rupiah)



### 2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010).

Adam Smith mengemukakan doktrinnya (Boediono, 2001) tentang sistem bebas berusaha, dimana campur tangan pemerintah adalah minimal, menurut kaum Klasik, bisa menjamin tercapainya:

- a) Tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal.
- b) Alokasi sumber-sumber alam dan faktor-faktor produksi lain diantara berbagai macam kegiatan ekonomi secara efisien.

Menurut kaum Klasik, peranan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin, sebab apa yang bisa dikerjakan pemerintah bisa dikerjakan oleh swasta secara lebih efisien.

Robert Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dimana penambahan penduduk meningkat secara deret ukur sedangkan penambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Seperti halnya David Ricardo, Malthus berbeda pendapat dengan Smith mengenai peran penduduk dalam pembangunan ekonomi. Menurut pendapat Smith yang belum menyadari hukum hasil yang semakin berkurang, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan

memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam satu generasi sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minimal atau upah subsisten (Sukirno, 2004).

David Ricardo mengembangkan teori pertumbuhan Klasik lebih lanjut. Tetapi garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum ditarik oleh Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Smith. Ricardo juga menganggap jumlah faktor produksi tanah tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985).

#### **2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Harod-Domar**

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

1. perekonomian bersifat tertutup
2. hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
3. proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return scale*), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005).

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisa dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:



$$g = k = n \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana:

$g$  = Growth (tingkat pertumbuhan output)

$k$  = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

$n$  = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

### 2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Neo-Klasik

Model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik Solow merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan Neo-Klasik sehingga penggagasnya, Robert Solow, dianugrahi hadiah Nobel bidang ekonomi. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambah faktor kedua, yakni tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi, kedalam persamaan pertumbuhan. Namun, berbeda dari model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap dengan koefisien baku, model pertumbuhan Neo-Klasik Solow berpegang skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut (Todaro dan Smith, 2009).

Model pertumbuhan Neo-Klasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar sebagai berikut:

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha} \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

$Y$  adalah produk domestik bruto

$K$  adalah stok modal fisik dan modal manusia

$L$  adalah tenaga kerja

$A$  adalah produktivitas tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

$\alpha$  adalah melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia).

Hal itu biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena  $\alpha$  diasumsikan kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan Neo-Klasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (Todaro dan Smith, 2009).

Menurut Schumpeter dalam Arsyad (2010), para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat perubahan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke daerah pemasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi tingkat efisiensi kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Schumpeter juga menambahkan makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang yang dalam pandangan Schumpeter keadaan tersebut akan terjadi pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.



#### 2.1.3.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) muncul dikarenakan kinerja teori neoKlasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoKlasik. teori pertumbuhan endogen atau secara lebih sederhana disebut dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan Gross National Product (GNP) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekulibrium jangka panjang (Todaro, 2009).

Model pertumbuhan endogen menggunakan persamaan sederhana yaitu:

$$Y=AK \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana:

$Y$  adalah : Pertumbuhan

$A$  adalah : mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi

$K$  adalah : melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada

Rumusan tersebut menekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang melampaui keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi itu, dan kelebihanannya cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Pada saat selanjutnya, hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi baru sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu

menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustained development*) dalam jangka panjang (Todaro, 2009).

Todaro juga menjelaskan bahwa melalui model pertumbuhan endogen dapat diketahui bahwa potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio modal tenaga kerjanya masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumber daya manusia (terutama melalui pengembangan fasilitas dan lembaga pendidikan), sarana-sarana infrastruktur, serta aneka kegiatan penelitian.

Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi di mana sumber daya manusia diakumulasikan selanjutnya. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri-industri padat teknologi, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian nasional demi mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam pembentukan modal manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri padat teknologi (Todaro, 2009).

#### **2.1.4 Kemiskinan**

Salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang adalah kemiskinan, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemiskinan banyak



dihadapi oleh rakyat Indonesia khususnya setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana tingkat kemiskinan cenderung naik dari tahun ke tahun. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Subandi, (2012) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) Kemiskinan Absolut ; Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. (2) Kemiskinan Relatif ; Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Subandi, 2010).

Teori lingkaran perangkap kemiskinan menurut Meier dan Baldwin mengemukakan bahwa lingkaran perangkap kemiskinan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dimana akan menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat. Tingkat produktivitas yang rendah yang terlihat dari ketidakmampuan mengarahkan tabungan yang cukup mengakibatkan tingkat penanaman modal yang rendah dan akan menyebabkan rendahnya pendidikan, kesehatan dan kemahiran masyarakat, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan produktivitas semakin rendah (Arsyad, 2010).

Dengan mengetahui perangkap kemiskinan maka dapat disimpulkan bahwa makin banyaknya jumlah penduduk miskin secara langsung (produktifitas yang rendah) akan menurunkan IPM di suatu daerah karena adanya keterbatasan mereka untuk mengakses kebutuhan terutama kebutuhan bahan makan dan menyebabkan terjadinya tingkat pendidikan dan kesehatan manusia yang rendah (Maryani, 2010).



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi empiris yang membahas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh (2013) dimana kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara bersama sama ditentukan oleh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran pendidikan secara signifikan ( $\text{sig } 0,023 < \text{sig } 0,05$ ) dan positif berpengaruh terhadap IPM. Dimana kenaikan anggaran pendidikan sebesar 1% akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebesar 2,36 dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel lain dianggap konstan).

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mauriza (2013), dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Kawasan Barat maupun Timur. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada Provinsi Aceh kawasan Barat sebesar 0,009 dan timur 0,003. Dimana kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 1 % akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,009 % pada kawasan Barat Aceh dan 0,003 % pada bagian Timur Aceh dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel lain dianggap konstan).

Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astri (2013) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia ( $t_{\text{hitung}} 3,02 > t_{\text{tabel}} 1,67$ ) dengan koefisien positif sebesar 0,902 yang berarti bahwa kenaikan pengeluaran

pemerintah daerah sektor pendidikan sebesar 1% akan menaikkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,902 satuan.

Korelasi positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM sejalan dengan penelitian Trimaryani (2009), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% terhadap perkembangan pembangunan manusia di Propinsi Jawa Tengah, dimana nilai koefisiennya sebesar 0,004, artinya apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan naik sebesar 1% maka akan menyebabkan IPM meningkat sebesar 0,004.

Akan tetapi tidak semua penelitian yang menghasilkan analisis sesuai dengan model. Badrudin (2011) menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan di Provinsi DIY saat tahun 2004-2008 dengan menggunakan model *time lag* 2 dan 3 tahun. nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dua tahun sebelumnya sebesar 0,015 yang artinya apabila terjadi kenaikan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1% maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan IPM di DIY untuk dua tahun kemudian sebesar 1,5% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Selain pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, menurut teori *human capital dalam ekonomi publik*, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan juga turut mempengaruhi IPM (Todaro, 2009). Mauriza (2013), penelitian yang menggunakan Metode Panel dan *Randhom Effect* menghasilkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM untuk kawasan Barat Propinsi Aceh dengan koefisien 0,020 dan kawasan Timur Propinsi Aceh dengan koefisien 0,016. Dimana di Kawasan Barat Propinsi Aceh pengeluaran



pemerintah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan lebih besar pengaruhnya terhadap IPM dibandingkan dengan Kawasan Provinsi Aceh Timur.

Akan tetapi, beberapa temuan empiris menemukan bahwa hubungan yang tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Astri(2013) dimana *secara parsial* pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah ( $t_{hitung} 0,41 < t_{tabel} 1,67$ ). Nilai koefisien untuk variabel ini adalah 0,198, apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka IPM akan naik sebesar 19,8% dan sebaiknya.

Temuan ini sejalan dengan Badrudin (2011), dimana tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan *time lag 2* maupun *time lag 3* tahun. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dua tahun kemudian adalah 0,020 dan koefisien untuk tiga tahun kemudian adalah 0,01. Artinya saat pengeluaran bidang kesehatan naik sebesar 1 % maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,020 % untuk dua tahun kemudian dan 0,01 % untuk tiga tahun kemudian.

Hal ini senada dengan penelitian Munawwaroh (2013) dengan metode data panel, dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini terlihat dari  $\text{sig } 0,49 > \text{sig } 0,05$ . Nilai koefisien variabel ini adalah sebesar 0,75, artinya saat pengeluaran bidang kesehatan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Jambi sebesar 0,75%.

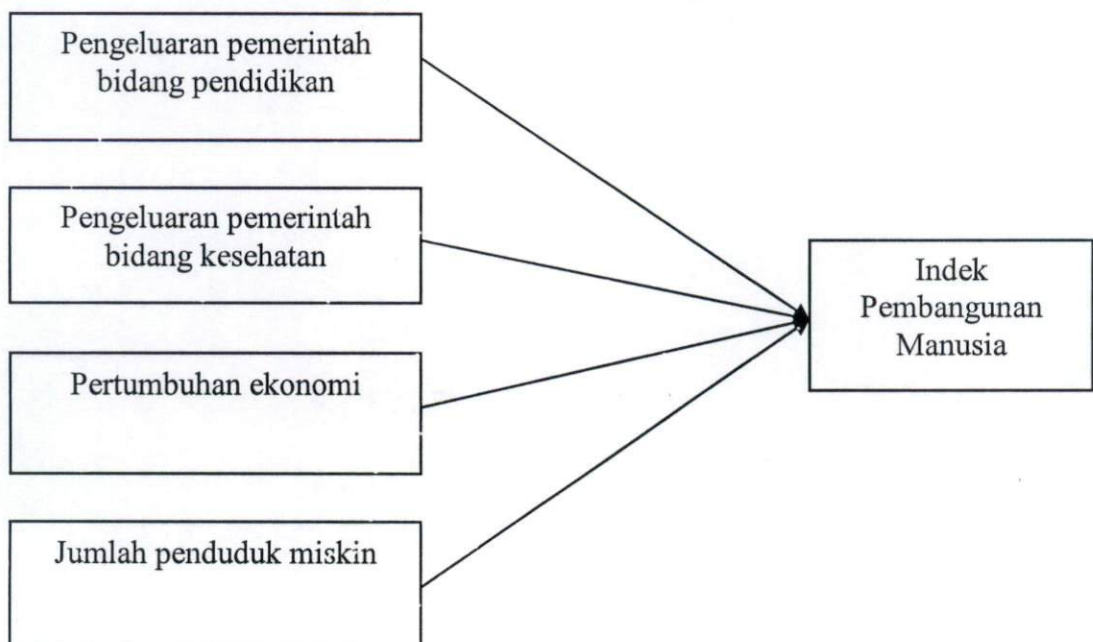
Selain dari sisi anggaran, pertumbuhan ekonomi juga ikut serta mempengaruhi pembangunan manusia pada suatu daerah. Hal ini dibuktikan oleh Munawwaroh (2013), dimana kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara bersama sama ditentukan oleh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dimana, secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Jambi. Nilai koefisien perekonomian terhadap kualitas sumberdaya manusia adalah sebesar 2,08. artinya apabila terjadi peningkatan perekonomian sebesar 1%, maka kualitas sumberdaya manusia akan mengalami peningkatan sebesar 2,08%. Dengan asumsi hal lain diluar perekonomian dianggap konstan (*ceteris paribus*).

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dari penelitian terdahulu di atas maka, dapat di gambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Konseptual**





Indek Pembangunan Manusia (Y), di Kabupaten Pasaman di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), dan jumlah penduduk miskin (X4).

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan pada masalah pokok yang telah dikemukakan, bahasan teoritik serta kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.
- b. Diduga variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman
- c. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.
- d. Diduga variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Kuncoro (2009) jika dilihat dari sumbernya data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data biasanya diperoleh dengan suvei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinil. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk menggumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner. Sedangkan data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna.

Berdasarkan definisi di atas maka data dalam penelitian ini termasuk kedalam data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa data menurut kurun waktu (*time series*). Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pasaman dan beberapa situs resmi pemerintah daerah.

Selanjutnya berdasarkan bentuk dan sifatnya data dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, simbol dan data lainnya yang bentuknya bukan angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan



dalam catatan lapangan (transkrip). Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Rianse, 2008). Berdasarkan hal tersebut, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang diperoleh adalah dalam bentuk angka yang dapat dihitung, seperti data indek pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013.

### **3.2 Deskripsi Data dan Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau dapat juga diartikan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Wiratha, 2006). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### **1. Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen merupakan variabel terkait, dimana besarnya variabelnya tergantung dari besaran variabel independen (bebas). Variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel Indek Pembangunan Manusia. Tingkat indek pembangunan manusia yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Kabupaten Pasaman dalam angka tahun 2004 sampai 2013.

#### **2. Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel-variabel independen yang digunakan adalah variabel-variabel yang diindikasikan mempengaruhi indek pembangunan manusia. Variabel-variabel independen tersebut antara lain adalah:

- a. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1).

Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD), Kabupaten Pasaman, dalam angka tahun 2004-2013.

- b. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2).

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD), Kabupaten Pasaman, dalam angka tahun 2004-2013.

- c. Variabel pertumbuhan ekonomi (X3).

Variabel pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha dengan harga konstan tahun 2000. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, dalam angka tahun 2004-2013.

- d. Variabel jumlah penduduk miskin (X4).

Variabel jumlah penduduk miskin diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, dalam angka tahun 2004-2013.

### 3.3 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah *Metode Ordinary Least Square (OLS)*, dan untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah aplikasi SPSS 20. Model data runtut waktu (*time series*) berusaha untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Model ini membuat asumsi bahwa apa yang terjadi di masa depan merupakan fungsi dari apa yang terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, model data runtut waktu (*time series*) mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu



tertentu dan menggunakan data runtut waktu masa lalu untuk memprediksi suatu kajian dimasa depan (Kuncoro dalam Fajar, 2011).

Untuk menganalisis dampak atau pengaruh dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Kabupaten Pasaman, maka digunakan model yang sudah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya Mauriza (2013) dan Badrudin (2013), jika digabungkan akan menghasilkan fungsi =  $f$  (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin). Kemudian selanjutnya variabel IPM di ubah menjadi  $Y$ , variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di ubah menjadi  $X_1$ , variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di ubah menjadi  $X_2$ , variabel pertumbuhan ekonomi di ubah menjadi  $X_3$ , dan variabel jumlah penduduk miskin diubah menjadi  $X_4$ . Berdasarkan pada model dan variabel itu maka dibentuklah sebuah model yang dapat dinotasikan secara fungsional menjadi :

$$Y = f ( X_1, X_2, X_3, X_4 ) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

$Y$  = Indeks Pembangunan Manusia (satuan)

$X_1$  = pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (rupiah)

$X_2$  = pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (rupiah)

$X_3$  = pertumbuhan ekonomi (satuan)

$X_4$  = jumlah penduduk miskin (satuan)

Fungsi di atas menurut Gujarati (2013) dapat diturunkan menjadi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Namun dikarenakan adanya beda variabel independen dan memiliki nilai satuan yang tidak sama, maka persamaan regresi ditransformasikan ke logaritma berganda (log-log) dengan menggunakan logaritma natural (ln) (Ghozali, 2013). Transformasi dalam bentuk Logaritma juga dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus multikolinieritas dan heteroskedastisitas, serta juga memudahkan dalam menginterpretasikan model, sehingga persamaan menjadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana :

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (satuan)
- X<sub>1</sub> = pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (rupiah)
- X<sub>2</sub> = pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (rupiah)
- X<sub>3</sub> = pertumbuhan ekonomi (satuan)
- X<sub>4</sub> = jumlah penduduk miskin (satuan)
- β<sub>0</sub> = Konstanta
- β<sub>1</sub> = Koefisien regresi
- e = error

### 3.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Uji Regresi

Untuk membantu pembahasan hasil analisis dari persamaan regresi yang telah dirumuskan maka perlu dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut:



#### **a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Apabila nilai  $R^2$  semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin baik karena dapat menjelaskan data aktual. Tetapi apabila nilai  $R^2 = 0$ , maka variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

#### **b. Pengujian F-Statistik**

Uji - F (F-test) bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , artinya secara keseluruhan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan apabila  $H_1 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$  maka terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Jika  $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ , ( $\alpha = 10\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan diterima  $H_1$ , berarti masing-masing variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.
- Jika  $F_{\text{Hitung}} < F_{\text{Tabel}}$ , ( $\alpha = 10\%$ ), Maka  $H_0$  diterima dan ditolak  $H_1$ , berarti masing-masing variabel independent secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent

#### **c. Pengujian T-Statistik**

Uji t- statistik bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh masing masing variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Gujarati 2013). Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai nilai t-test

dengan nilai t-tabel, atau bisa juga dengan membandingkan nilai sig dengan nilai alfa (tingkat kesalahan). Hipotesis yang bisa dikemukakan adalah :

Ho : koefisienan regresi tidak signifikan

Ha : koefisienan regresi signifikan

Ketentuan pengambilan keputusan dengan menggunakan t-test antara lain adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya suatu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2.  $H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya suatu variabel independent mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengujian dengan tingkat signifiian 90% ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , ( $\alpha = 10\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , ( $\alpha = 10\%$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Tujuan dilakukan uji asumsi klasik adalah untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai dengan kaidah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji otokorelasi. Selain model regresi dapat dikatakan baik apabila lulus uji asumsi klasik yang berarti bahwa data linier, terdistribusi secara normal, bebas dari gejala multikol, bebas heteroskedastisitas dan bebas dari otokorelasi (Suliyanto, 2011).

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui dan memastikan nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi dengan normal atau tidak.



Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka dikatakan mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013).

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas berarti terjadinya kondisi linier mendekati sempurna antara lebih dari variabel bebas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas. Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan korelasi parsial yang dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi ( $R^2$ ) keseluruhan dengan nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebas. Jika nilai koefisien determinasi  $R^2$  lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011).

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas disebabkan karena adanya penyebaran yang tidak sama dari unsur gangguan  $\mu_i$ . Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik jenis heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot. Apabila grafik scatterplot membentuk pola yang tidak dapat dibaca (tersebar), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji otokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang. Dalam penelitian ini otokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW test). Ketentuan dalam autokorelasi adalah :

1. Apabila  $du < dw < 4-du$ , berarti tidak ada autokorelasi.
2. Apabila  $dw < dL$ , berarti ada autokorelasi positif.
3. Dan jika  $dw > 4-dL$  artinya ada autokorelasi negative
4. Sedangkan jika  $du < dw < dL$  maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

#### **e. Uji Linearitas**

Pengujian linearitas perlu dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan model linear atau tidak. Hasil dari uji linearitas adalah informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Dalam analisa ini untuk menguji model apakah sebaiknya menggunakan persamaan linear atau tidak maka digunakan metode metode Lm Test. Model dinyatakan linear apabila  $X^2$  hitung ( $nxR^2$ ) lebih kecil dari pada  $X^2$  tabel dengan  $df=(n,\alpha)$  (Suliyanto,2011).



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Kabupaten Pasaman**

##### **4.1.1 Gambaran Geografis**

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatra Barat. Dengan luas wilayah 3.947.63 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 32 Nagari. Secara geografis, Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis Khatulistiwa dan berada pada 00<sup>0</sup>55' Lintang Utara sampai dengan 00<sup>0</sup>06' Lintang Selatan dan 99<sup>0</sup>45' Bujur Timur sampai dengan 100<sup>0</sup>21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling utara dari Propinsi Sumatra Barat dan berbatasan dengan yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan  
Kab. Padang Lawas Prop. Sumatra Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau  
dan Kab.Lima Puluh Kota
- Sebelah Selatan : Kabupaten Agam
- Sebelah Barat : Kaputaen Pasaman Barat

Pada beberapa Kecamatan terdapat beberapa gunung seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Gunung Kelabu di Dua Koto, Gunung Malenggang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping itu dengan Ketinggian 2.271 meter.

Di setiap kecamatan mengalir beberapa sungai. Kecamatan-kecamatan yang banyak di lalui sungai adalah Kecamatan Bonjol yang di lalui 15 sungai diantaranya Batang Silabung, Batang Musus, Kecamatan Tigo Nagari yang dilalui 22 sungai diantaranya Batang Landu, dan Batang Likek, Kecamatan Lubuk Sikaping yang dilalui 25 sungai diantaranya Batang Sumpur, Batang Anang, Batang Paninggalan, dan Batang Mauah, Kecamatan Duo Koto yang dilalui 16 sungai diantaranya Batang Pasaman, Batang Barilis, dan Kecamatan Panti yang dilalui 22 sungai diantaranya Batang Mapun dan Batang Rambah. Berikut adalah tabel pembagian wilayah pemerintahan Kabupten Pasaman:

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Adminitratif Kabupaten Pasaman**

NO	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)	Ketinggian (m)
1	Tigo Nagari	352,92	8,94	50 - 2.912
2	Bonjol	194,32	4,92	100 – 1.160
3	Simpang Alahan Mati	69,56	1,76	100 - 890
4	Lubuk Sikaping	346,5	8,78	275 – 2.340
5	Dua Koto	360,63	9,14	300 – 2.172
6	Panti	212,95	5,39	221 – 1.521
7	Padang Gelugur	159,95	4,05	250 – 1.220
8	Rao	236,18	5,98	250 – 1.1220
9	Rao Utara	598,63	15,16	360 – 1.886
10	Rao Selatan	338,98	8,59	252 – 1.100
11	Mapat Tunggul	605,29	15,33	150 – 2.281
12	Mapat Tunggul Selatan	471,72	11,95	150 – 2.281
	<b>Total</b>	<b>3.947,63</b>	<b>100,00</b>	<b>50 – 2.912</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2013*



Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa daerah Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar di seluruh daerah. Dari data publikasi BPS, terlihat Kecamatan yang memiliki daerah paling luas adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan persentase luas wilayah adalah sebesar 15,33% dari total keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas daerah paling kecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan persentase luas daerah hanya sebesar 1,76% dari total keseluruhan. Pusat pemerintahan daerah terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping yang sekaligus digunakan sebagai Ibu kota Kabupaten Pasaman.

#### **4.1.2 Gambaran Demografi**

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman dari tahun 2008 sampai tahun 2012 adalah sebanyak 1.300.860 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk yang terendah adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 255.186 jiwa. Sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 263.780 jiwa. Dengan sex ratio sebesar 98, yang berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk secara aritmatik tercatat sebesar - 3,25%, ini merupakan pertumbuhan penduduk terendah dari tahun 2008-2012. Hal ini bisa dijelaskan karena beberapa hal diantaranya terjadinya migrasi yang cukup besar dari Kabupaten Pasaman ke daerah lain dan atau memang terjadi *under estimate* pada periode sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,45%, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 128.063 dan perempuan sebanyak 130.843 orang. Berikut tabel yang menjelaskan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman dari tahun 2008-2012:

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Pasaman Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2004-2013**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan rata-rata (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2004*	128.999	130.672	259.671	-
2005	123.628	126.029	249.652	-3,85
2006	126.911	129.149	259.060	3,76
2007	128.141	130.490	258.631	-0,16
2008	129.333	131.654	260.987	0,91
2009	130.730	133.050	263.780	1,07
2010	126.181	129.005	255.186	-3,25
2011	128.063	130.843	258.906	1,45
2012	129.498	132.503	262.001	1,19
2013	138.508	133.330	263.838	0,70

*Sumber : Pasaman Dalam Angka 2004\*) data diolah*

#### **4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman**

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya dari sisi non ekonomi dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau lebih dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) (Subandi, 2010). Hasil capaian perkembangan IPM Kabupaten Pasaman selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.3**  
**Nilai dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>	<b>Pertumbuhan IPM (%)</b>
2004	67,90	-
2005	69,70	2,65
2006	70,60	1,29
2007	71,05	0,63
2008	71,71	0,92
2009	72,32	0,85
2010	72,71	0,53
2011	73,19	0,66
2012	73,78	0,80
2013	74,10	0,43
<b>Rata-rata</b>		<b>0,97</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman 2013*

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman mengalami kenaikan bertahap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,97%, dengan IPM pada tahun 2004 sebesar 67,9 menjadi 74,10 pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup bagus di Kabupaten Pasaman.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,43%. Dimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2012 sebesar 73,78 hanya naik menjadi 74,10 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan

karena masih lemahnya perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tahun ini, yang terlihat dari menurunnya persentase pengeluaran pemerintah bidang kesehatan serta turunnya persentase pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) pada tahun 2013 ini.

Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 2,65%. Dimana peningkatan IPM dari tahun 2004 sebesar 67,9 naik menjadi 69,7 pada tahun 2005. Tingginya pertumbuhan terjadi karena pesatnya peningkatan PDRB serta tingginya persentase penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 di daerah Kabupaten Pasaman. Dengan adanya perubahan yang besar pada kedua fakto ini membuat IPM di Kabupaten Pasaman juga meningkat dengan cepat.

#### **4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten**

##### **Pasaman**

Kebijakan pemerintah berupa investasi pemerintah baik dibidang pendidikan maupun kesehatan berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan pengeluaran di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 mengenai anggaran pendidikan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah yang sesuai dengan amanat perundang undangan No 23 tahun 2003. Adapun realisasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari tabel berikut :



**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan**  
**di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (%)</b>
2004	114.253.542.507	-
2005	64.646.492.639	-43,41
2006	87.513.695.338	35,37
2007	118.625.287.893	35,55
2008	148.654.872.365	25,31
2009	144.404.856.985	-2,85
2010	189.360.742.656	31,13
2011	252.714.389.547	33,45
2012	262.869.763.602	4,01
2013	280.805.344.799	6,82
<b>Rata-rata</b>		<b>-4,82</b>

*Sumber : DPP-KAD Kabupaten Pasaman 2004-2013*

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa realisasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Kabupaten Pasaman mengalami fluktuasi dari tahun 2004 sampai 2013. Dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,82%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2004 menuju tahun 2005 yaitu sebesar -43,41% dengan jumlah anggaran pada tahun 2004 sebesar Rp. 114.253.542.507 menjadi Rp. 64.646.492.639 pada tahun 2005.

Penurunan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk sektor pendidikan di Kabupaten Pasaman tersebut terjadi karena adanya pemekaran daerah pada tanggal 7 Januari 2004 sesuai dengan Undang-Undang No 38 tahun 2003 tentang otonomi daerah, di mana Pasaman di bagi menjadi dua wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan inilah yang menjadi faktor utama penurunan anggaran tersebut. Di mana ketika sebelum pembagian terjadi wilayah Pasaman merupakan wilayah dengan populasi penduduk yang cukup padat dan memiliki luas wilayah yang cukup besar, bahkan Pasaman menempati urutan pertama dalam hal luas daerah dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Dengan total luas daerah sebelum pemekaran sebesar 7.835,4 Km<sup>2</sup>.

Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 menuju tahun 2007 yaitu sebesar 35,55%, dengan total anggaran pada tahun 2006 sebesar Rp. 87.513.695.338 menjadi Rp. 118.625.287.893 pada tahun 2007. Hal ini membuktikan bahwa adanya usaha peningkatan IPM dari sisi pendidikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dengan cara meningkatkan belanja daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2007 untuk bidang pendidikan.

#### **4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasaman**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan kebijakan fiskal dari pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, Arsyad (2010) mengatakan pemerintah harus dapat meningkatkan pengeluaran di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun



realisasi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tahun 2004-2013 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan**  
**di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (%)</b>
2004	13.167.448.185	-
2005	9.626.169.039	-26,89
2006	19.632.619.783	103,95
2007	20.187.885.231,00	2,82
2008	22.963.563.166,00	13,74
2009	25.683.677.670,00	11,84
2010	26.957.537.209,00	4,95
2011	1.867.678.000,00	-93,07
2012	3.941.400.250,00	111,03
2013	6.167.015.795,00	56,46
<b>Rata-rata</b>		<b>20,53</b>

*Sumber : DPP-KAD Kabupaten Pasaman 2004-2013*

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa nilai anggaran bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dari tahun 2004-2013 selalu mengalami fluktuasi. Dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 20,53%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 menuju tahun 2011 yaitu sebesar -

93,07%, dengan total anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp. 26.957.537.209,00 menjadi Rp. 1.867.678.000,00 pada tahun 2011.

Penurunan anggaran ini disebabkan karena pada tahun 2010 terjadi pergantian kepala daerah di Kabupaten Pasaman. Dengan adanya pertukaran kepala daerah tersebut secara langsung juga akan berdampak pada berubahnya susunan rencana alokasi anggaran yang akan di jalankan. Pada awal-awal pemerintahanya Bupati terpilih lebih memfokuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang cukup besar di Kabupaten Pasaman dengan cara meningkatkan anggaran untuk bidang kemiskinan tersebut. Namun akibatnya anggaran untuk sektor atau bidang lainnya termasuk anggaran untuk bidang kesehatan harus dikurangi. Ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan Bupati Kabupaten Pasaman pada masa jabatan 2010-2015 yaitu melakukan pemotongan sebanyak 25% Tunjangan Kinerja Pegawai atau yang sering disebut Tunjada pada awal kepemimpinannya di 2011 dengan alasan Kabupaten Pasaman sebagai daerah yang memilki masyarakat miskin yang besar di Sumatera Barat tetapi malah memberikan Tunjangan Kinerja Pegawai yang termasuk terbesar di Sumatera Barat. Alasan ini lebih diperkuat lagi dengan adanya bukti bahwa telah terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman dari tahun 2010 ke 2011 yaitu dari -8,73% menjadi -3,59%.

Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 menuju tahun 2012 yaitu sebesar 111,03%, dengan total anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.867.678.000,00 menjadi Rp.3.941.400.250,00 pada tahun 2012. Peningkatan anggaran ini disebabkan karena adanya kebijakan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan untuk meningkatkan anggaran bidang kesehatan yang sebelumnya anggaran ini telah dikurangi. Hal ini tercantum dalam susunan kebijakan-kebijakan



Bupati Kabupaten Pasaman antar lain yaitu Program Jaminan Kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman yang mulai dijalankan terhitung 1 Januari 2013, yang menggratiskan seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit rujukan lainnya serta dibentuknya Program Rumah Singgah yang diluncurkan pada tahun 2013, dipergunakan untuk keluarga penunggu pasien yang di rawat di Pusat Pelayanan Pasien agar tidak tidur bergelimpangan di teras atau tempat lain di sekitar Rumah Sakit dan Pukesmas.

#### **4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang ikut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di suatu negara atau daerah. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terjadinya kenaikan atau penurunan PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu daerah dan ikut serta mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah. PDRB di setiap daerah berbeda-beda, tergantung bagaimana suatu daerah dapat memanfaatkan potensi dari segala sektor untuk bersama-sama menyumbang kontribusi yang besar guna meningkatkan pertumbuhan IPM.

PDRB dianalisis dalam dua konsep harga yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflansi dan deflasi, sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya

PDRB atas harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflansi dan deflasi. Dalam melakukan suatu kajian atau analisis, maka PDRB yang sering digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan, dimana data tersebut telah memperhitingkan inflansi, sehingga sudah mendekati kebenaran. Sejalan dengan hal itu, dalam penelitian ini juga menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan yaitu harga konstan 2000 berdasarkan lapangan usaha. PDRB Kabupaten Pasaman dari tahun 2004 sampai tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan, berikut merupakan data PDRB atas harga konstan 2000 di Kabupaten Pasaman:

**Tabel 4.6**  
**Nilai dan Perkembangan PDRB Kabupaten Pasaman Atas Harga Konstan 2000**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (milyar Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2004	967.925,44	-
2005	1.022.262,67	5,61
2006	1.081.242,18	5,76
2007	1.145.234,53	5,91
2008	1.214.884,21	6,08
2009	1.289.261,24	6,12
2010	1.368.459,79	6,14
2011	1.452.571,39	6,14
2012	1.541.988,67	6,15
2013	1.636.516,08	6,13
<b>Rata-rata</b>		<b>6,00</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Pasaman, tahun 2013*



Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa selama periode 2004 hingga 2013 perekonomian Kabupaten Pasaman memperlihatkan keadaan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dimana mengalami pertumbuhan PDRB secara rata-rata sebesar 6,00%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 5,61%, dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1.022.262,67. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut harga komoditi unggulan yang ada di Pasaman seperti padi, kakao, karet, dan lain-lainnya cenderung memperlihatkan keadaan yang selalu menurun sehingga menyebabkan penerimaan petani semakin kecil bahkan tidak mencukupi kebutuhannya. Alasan ini dikemukakan karena sektor yang paling berperan besar memberikan sumbangan untuk kenaikan PDRB di Kabupaten Pasaman adalah sektor pertanian. Sedangkan Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 menuju tahun 2012 yaitu sebesar 6,15%. Dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1.452.571,39 pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.541.988,67 pada tahun 2012.

#### **4.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman**

Rendahnya pendapatan penduduk miskin mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas mereka menjadi rendah dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia suatu daerah akan semakin rendah dan tidak sejahtera.

Jumlah penduduk miskin akan sangat mempengaruhi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Dimana semakin banyak jumlah penduduk miskin pada suatu daerah akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah itu sendiri. Sebaliknya semakin sedikit jumlah penduduk miskin pada suatu daerah akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah

tersebut. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasaman dari tahun 2004 hingga 2013 terlihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Nilai dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah penduduk miskin (orang)</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah penduduk miskin (%)</b>
2004	73400	-
2005	36800	-49,86
2006	45600	23,91
2007	42800	-6,14
2008	35000	-18,22
2009	30460	-12,97
2010	27800	-8,73
2011	26800	-3,59
2012	24330	-9,21
2013	22150	-8,96
<b>Rata-rata</b>		<b>-10,41</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Pasaman, tahun 2013*

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman dari tahun 2004 sampai tahun 2013 selalu mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun. Tercatat hanya terjadi satu kali kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman yaitu dari tahun 2005 menuju tahun 2006 dengan jumlah penduduk miskin dari



36.800 menjadi 45.600 orang. Selain tahun tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman selalu mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 73.400 dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 22.150 orang.

Secara rata-rata pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten Pasaman adalah sebesar -10,41%. Nilai pertumbuhan negatif ini mengidentifikasikan bahwa setiap tahunnya cenderung terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman, dalam arti lain setiap tahun pemerintah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Penurunan kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2004 menuju tahun 2005 yaitu sebesar -49,86%. Hal ini disebabkan karena adanya otonomi daerah atau pemekaran yang membagi Kabupaten Pasaman menjadi dua bagian pemerintahan yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat pada 7 Januari 2004. Jumlah penduduk yang tinggi pada tahun 2004 disebabkan karena kedua daerah pada tahun tersebut masih bergabung dan jumlah penduduknya masih di totalkan bersama. Selain itu turunnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasaman disebabkan karena merupakan dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang di jalankan oleh Pemerintah Daerah, seperti Program PNPM mandiri, Bantuan Perumahan miskin, Jamkesmas dan Jamkesko, Bea siswa, KMN, Kredit Usaha Mikro (BLUD), KUR, Pamsimas, Sanimas dan berbagai bantuan serta program terkait lainnya yang disertai iklim usaha yang semakin baik di daerah Kabupaten Pasaman.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan data empiris yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan yaitu untuk membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan selama periode 2004-2013. Untuk membantu memudahkan pengolahan data maka di gunakan program SPSS Statistik 20.

#### **5.1 Analisis Data**

##### **5.1.1 Analisis Model Regresi**

Analisis regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Namun, dalam pengolahan data yang penulis lakukan, penulis menggunakan pengujian regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
\text{Ln Y} &= 55,411 + 0,982 \text{ LnX1} - 0,038 \text{ LnX2} + 2,565 \text{ X3} - 2,233 \text{ LnX4} \\
t\text{-hitung} &= (3,675) \quad (2,443) \quad (-0,209) \quad (2,409) \quad (-2,617) \\
F\text{-hitung} &= 72,126 & t\text{-tabel} &= 1,476 \\
R^2 &= 0,991 & F\text{-tabel} &= 3,52 \\
\text{Adjusted } R^2 &= 0,969
\end{aligned}$$

Berdasarkan pengolahan output yang telah dilakukan, maka dapat di buat interpretasi terhadap model atau hipotesa yang telah di dibuat sebelumnya. Adapun hasil interpretasinya adalah sebagai berikut :

#### 5.1.1.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Seperti yang ditunjukkan pada *Model Summary* di lampiran, dapat dilihat bahwa nilai R square yang dihasilkan yaitu sebesar 0,991 yang berarti pada derajat kepercayaan 90 persen, sebesar 99,1% tingkat Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,09% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Untuk mengurangi bias dalam pengujian  $R^2$  maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square ( $R^2$ ). Dalam penelitian ini ditemukan nilai R Square adjusted yaitu sebesar 0,969 yang berarti, pada derajat kepercayaan 90 persen, sebesar 96,9% Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin, sedangkan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 5.1.1.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara statistik koefisien regresi dari variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel.

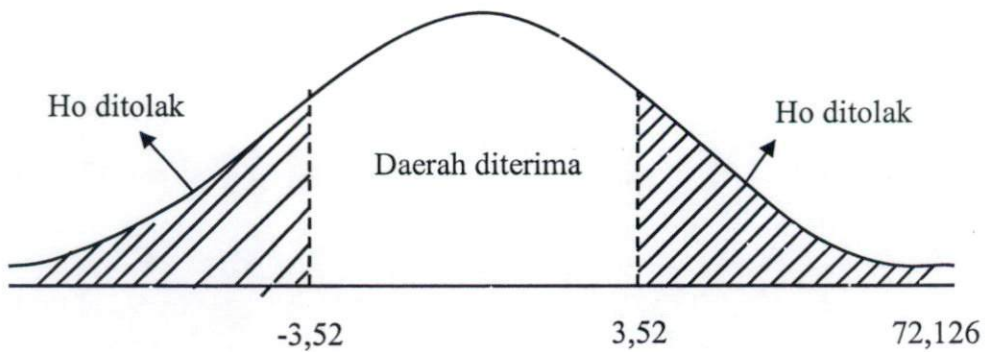
Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau  $sig > 0,10$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- b. Apabila  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau  $sig < 0,10$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 72,126 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan F-tabel pada kepercayaan 90% ( $\alpha = 0,10$ ) adalah 3,52 dimana F-tabel dihitung dengan cara  $df1 = k-1$  dan  $df2 = n-k$ , dimana k adalah jumlah variabel dependen (1) dan variabel independen (4), dan n adalah jumlah data (10), dan n adalah jumlah data (10), sehingga didapatkan nilai F-tabel (4;5) sebesar 3,52. Hal ini berarti bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $72,126 > 3,52$ ), maka sesuai dengan kriteria pertama bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan formulasi  $H_a : \beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad 0$ . Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pada derajat kepercayaan 90 persen ( $\alpha = 0,10$ ), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman. Dengan demikian model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.



**Gambar 5.1**  
**Uji F Variabel Secara Simultan**



#### 5.1.1.3 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (bebas) secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen (terikat). Uji t sering juga disebut sebagai uji individual. Dalam penelitian ini, derajat kepercayaan yang digunakan adalah 90% atau  $\alpha = 0,10$ . Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung setiap variabel independent dengan nilai t-tabel pada  $df = (n - k)$ , dimana  $n$  = jumlah data dan  $k$  = jumlah seluruh variabel termasuk variabel independent.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $sig > 0,10$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig < 0,10$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut pengujian pengaruh variabel secara parsial :

**Tabel 5.1**  
**Hasil Regresi**

Variabel	koefisien	Sig.	t- hitung	t- tabel	keterangan
LNx1	0,982	0,058	2,443	1,476	Signifikan
LNx2	-0,038	0,843	-0,209	1,476	Tidak Signifikan
Pertumbuhan ekonomi	2,565	0,061	2,409	1,476	Signifikan
LNx4	-2,233	0,047	-2,617	1,476	Signifikan

*Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 20*

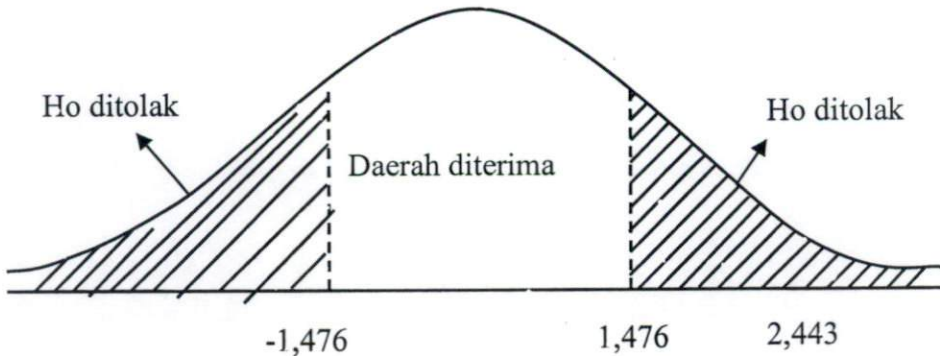
**a. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap tingkat  
Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013**

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat nilai t-hitung pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yaitu sebesar 2,443, Sedangkan t-tabel sebesar 1,476 yang dihitung dengan cara  $df = (n - k)$ , dimana  $n$  = jumlah data (10) dan  $k$  = jumlah seluruh variabel (5) dengan derajat kepercayaan 90% ( $\alpha = 0.10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2,443 > 1,476$ ). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak sehingga dapat di interpretasikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.



Gambar 5.2

Uji t Pada Koefisien Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

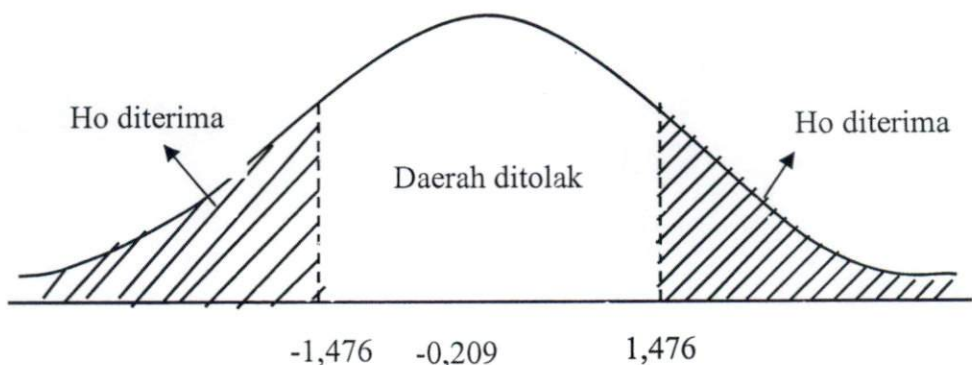


b. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap tingkat  
Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat nilai t-hitung pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yaitu sebesar -0,209 sedangkan t-tabel sebesar 1,476 dimana hasil ini dihitung dengan cara  $df = (n - k)$ , dimana  $n$  = jumlah data (10) dan  $k$  = jumlah seluruh variabel (5). Dengan derajat kepercayaan 90% ( $\alpha = 0.10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ( $-0,209 < -1,476$ ). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak, sehingga dapat di interpretasikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

Gambar 5.3

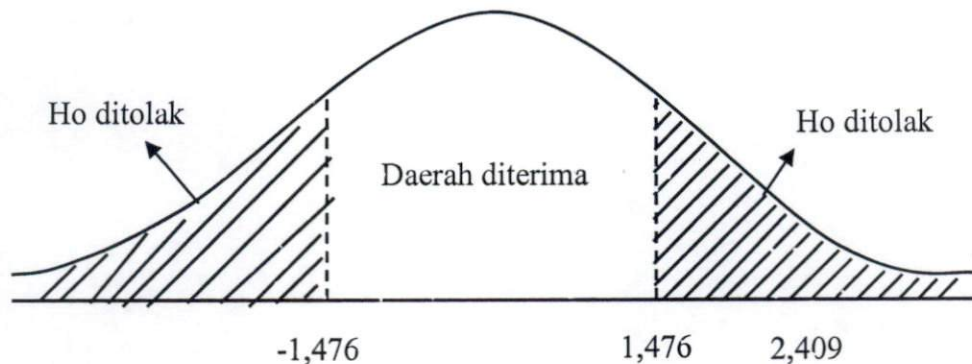
Uji t Pada Koefisien Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan



**c. Pengaruh Petumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013**

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat nilai t-hitung pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 2,409 sedangkan t-tabel sebesar 1,476 dimana hasil ini dihitung dengan cara  $df = (n - k)$ , dimana  $n$  = jumlah data (10) dan  $k$  = jumlah seluruh variabel (5). Dengan derajat kepercayaan 90% ( $\alpha = 0.10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2,409 > 1,476$ ). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

**Gambar 5.4**  
**Uji t Pada Koefisien Pertumbuhan Ekonomi**



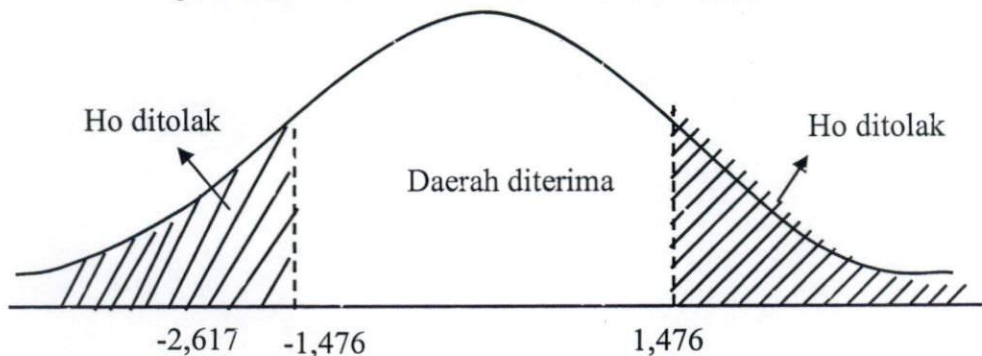
**d. Pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman tahun 2004-2013**

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat nilai t-hitung jumlah penduduk miskin yaitu sebesar -2,617 sedangkan t-tabel sebesar 1,476 dimana hasil ini dihitung dengan cara  $df = (n - k)$ , dimana  $n$  = jumlah data (10) dan  $k$  = jumlah seluruh variabel (5). Dengan derajat kepercayaan 90% ( $\alpha = 0.10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $-2,617 > -1,476$ ). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$



t-tabel maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

**Gambar 5.5**  
**Uji t Pada Koefisien Jumlah Penduduk Miskin**



## 5.2 Pembahasan

Setelah dilakukan uji regresi dengan bantuan program SPSS 20, maka dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

### a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, dimana nilai koefisiennya sebesar 0,982 dengan tingkat signifikannya 0,058. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman sebesar 0,982% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya, teori *human capital* mengemukakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, artinya

jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada IPM di daerah tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh (2013), dimana ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jambi. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah nilai signifikan anggaran pendidikan sebesar 0,023, artinya apabila terjadi kenaikan anggaran sebesar 1% oleh pemerintah maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada indeks pembangunan manusia di Propinsi Jambi sebesar 0,023%.

Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian Mauriza (2013), dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Aceh Kawasan Barat maupun Timur. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada provinsi Aceh kawasan Barat sebesar 0,009. Dimana kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 1% akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,009 % dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel lain dianggap konstan). Sedangkan koefisien Aceh bagian Timur sebesar 0,003 yang berarti kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,003 %.

Peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Pasaman disebabkan karena pemerintah sudah memprioritaskan sektor pendidikan dalam pembangunan. Hal ini terbukti dari di buatnya program wajib belajar 12 tahun yang di lakukan dengan menggratiskan biaya sekolah pada siswa dan siswi dari SD sampai SMA di daerah Kabupaten



Pasaman. Dengan adanya sekolah gratis tersebut membuat keinginan orang tua dan anak semakin tinggi untuk sekolah, karena mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya. Semakin banyak masyarakat yang sekolah secara langsung akan memberikan dampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu pemerintah Kabupaten Pasaman sudah memprogramkan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan Fasilitas pendidikan, dengan adanya program tersebut akan memberikan perubahan yang besar bagi proses pendidikan di Kabupaten Pasaman.

**b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan persamaan regresi yang didapat, ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, dimana nilai koefisiennya sebesar -0,038 dengan tingkat signifikannya 0,843. Persamaan tersebut dapat diartikan, apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,038% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hubungan yang negatif yang ditunjukkan dengan tanda minus (-) pada koefisien pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berarti pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang negatif.

Dalam penelitian ini, meskipun pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki hubungan negatif terhadap IPM, namun dampak yang dihasilkan belum signifikan. Terlihat dari nilai signifikan yang lebih besar dari 0,10 yang berarti peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Kabupaten Pasaman belum mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan. Berarti

upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran terhadap bidang kesehatan di Kabupaten Pasaman belum mampu meningkatkan IPM.

Hal ini diduga terjadi karena dana yang di berikan digunakan untuk hal yang tidak tepat sasaran yang mana tidak memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan IPM, misalnya untuk perbaikan atau renofasi gedung, sedangkan yang dibutuhkan sebenarnya adalah alat-alat medis untuk menunjang proses pengobatan dan perawatan.

Penelitian Astri (2013), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah ( $t_{hitung} 0,41 < t_{tabel} 1,67$ ). Nilai koefisien untuk variabel ini adalah 0,198, artinya apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka IPM akan naik sebesar 0,198%.

Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian Badrudin (2011), dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan indeks Pembangunan Manusia di Propinsi DIY baik dengan menggunakan pengamatan *time lag* 2 maupun *time lag* 3 tahun. Nilai koefisien dua tahun adalah 0,020 dan koefisien untuk tiga tahun kemudian adalah 0,01. Artinya saat pengeluaran bidang kesehatan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,020% untuk dua tahun dan 0,01% untuk tiga tahun kemudian.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Munawwarch (2013), juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini terlihat dari nilai sig  $0,49 > sig 0,05$ . Nilai koefisien variabel ini adalah sebesar 0,75, artinya



saat pengeluaran bidang kesehatan naik sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM di Propinsi Jambi sebesar 0,75%.

Berarti penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya, teori *human capital* mengemukakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, artinya jika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut.

#### **c. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, dimana nilai koefisiennya sebesar 2,565 dengan tingkat signifikannya 0,061. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman sebesar 2,565% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hal ini senada dengan penelitian Munawwaroh (2013), dimana secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM di Propinsi Jambi dengan nilai koefisien sebesar 2,08. Artinya apabila terjadi peningkatan perekonomian sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya IPM sebesar 2,08%.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang Todaro (2009), dimana mengemukakan bahwa apabila suatu negara atau daerah ingin meningkatkan kualitas

sumber daya manusia maka harus di iringi dengan peningkatan perekonomian dengan sebaik mungkin, karena kedua hal ini seyogyanya saling berhubungan.

Pengaruh yang signifikan ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Pasaman sudah mengalokasikan anggaran pada sektor yang paling potensial yang mempengaruhi PDRB, yaitu pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan PDRB. Semakin banyak anggaran yang diberikan kepada sektor pertanian, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan akan berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, tentunya dana ini harus selalu digunakan tepat sasaran.

#### **d. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, dimana nilai koefisiennya sebesar -2,233 dengan tingkat signifikannya 0,047. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa, jika terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman sebesar 2,233% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hubungan yang negatif yang ditunjukkan dengan tanda minus (-) pada koefisien jumlah penduduk miskin berarti jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang negatif.

Penelitian ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Meier dan Baldwin (Todaro, 2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi antara produktivitas yang rendah dengan penurunan kualitas



manusia, dimana dengan meningkatnya kemiskinan (produktivitas yang rendah) di suatu negara atau daerah maka akan menurunkan kualitas sumber daya manusia atau IPM di daerah atau negara tersebut dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan temuan empiris dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dari keempat variabel independen, yang sangat berpengaruh terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan koefisien 0,982, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan koefisien -0,038, kemudian variabel pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 2,565 dan terakhir adalah variabel jumlah penduduk miskin dengan koefisien -2,233.

### **5.3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidak penyimpangan yang terdapat pada model regresi seperti multikolinieritas, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan linearitas. Apabila ada penyimpangan terhadap asumsi klasik maka uji t dan uji f yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat membuat rancu kesimpulan yang diperoleh.

#### **5.3.1 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinear (Suliyanto, 2011). Dalam penelitian ini, untuk menguji model regresi apakah terbebas dari masalah multikolinearitas maka

dilakukan dengan pengujian yaitu melalui metode korelasi parsial. Berikut hasil pengujian multikolinear dengan metode korelasi parsial:

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	55,411	15,076		3,675	,014		
	LN <sub>X1</sub>	,982	,402	,249	2,443	,058	,329	3,039
	LN <sub>X2</sub>	-,038	,183	-,018	-,209	,843	,471	2,125
	PERTUMBUHAN EKONOMI	2,565	1,064	,400	2,409	,061	,124	8,080
	LN <sub>X4</sub>	-2,233	,853	-,411	-2,617	,047	,138	7,225

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian di atas, terlihat bahwa nilai TOL variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 0,329, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 0,471, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124 dan jumlah penduduk miskin sebesar 0,138. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel bebas (independen) yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 90 persen. Selanjutnya dengan melihat tabel VIF, besaran VIF pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 3,039, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 2,125, pertumbuhan ekonomi sebesar 8,080 dan jumlah penduduk miskin sebesar 7,225. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai lebih besar

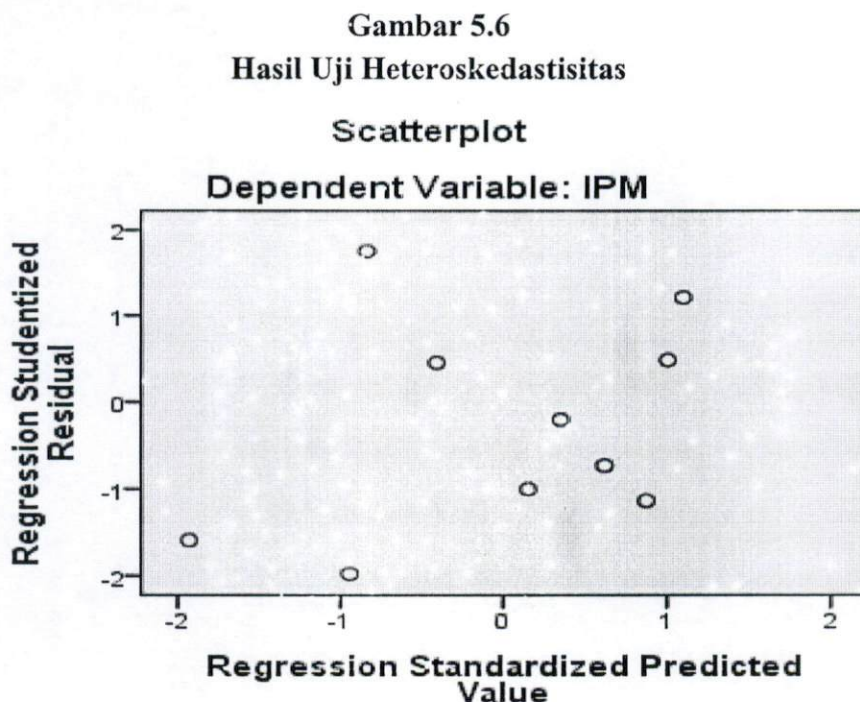


(>) dari 10 yang berarti bahwa pada model regresi yang terbentuk ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala multikolinear.

### 5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dalam pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan mengamati *scatterplot*, dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicted standardized* sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai *residual studentized*.

Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk sedangkan apabila *scatterplot* menyebar secara acak maka hal ini menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 2011). Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas dengan melakukan uji *scatterplot*:



Hasil dari pengujian di atas menunjukkan bahwa, *scatterplot* membentuk pola yang tidak mudah di baca atau menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk sehingga model regresi layak untuk dipakai.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil grafik plot (Ghozali, 2013) serta untuk mendukung bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas maka dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,438	7,164		,340	,747
LN <sub>X1</sub>	-,127	,191	-,494	-,663	,537
LN <sub>X2</sub>	-,023	,087	-,165	-,264	,802
PERTUMBUHAN EKONOMI	,184	,506	,441	,363	,732
LN <sub>X4</sub>	,045	,405	,128	,111	,916

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS



Berdasarkan output di tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

### 5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dibentuk terdapat atau tidaknya gejala Autokorelasi maka dilakukan pengujian dengan metode Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa nilai residual adalah acak atau random (Suliyanto, 2011). Berikut hasil pengujian Autokorelasi dengan metode Run test:

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Runs Test**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,08216
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

*Sumber : Data diolah menggunakan SPSS*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada metode Runs Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  yang berarti Hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

#### **5.3.4 Uji Normalitas**

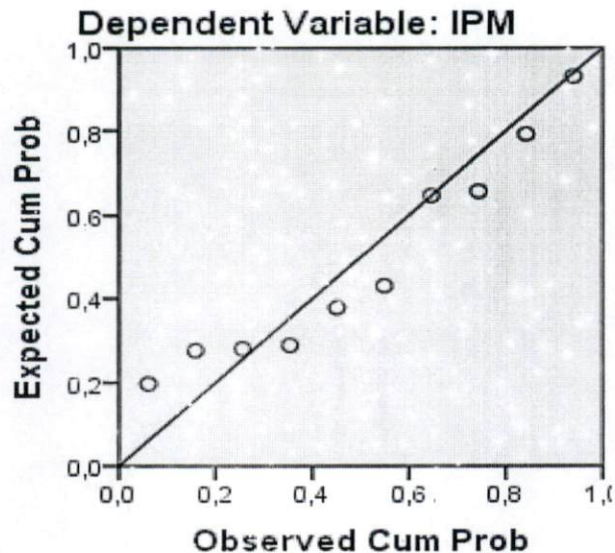
Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut, sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan kurva membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut, maka uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (Suliyanto, 2011). Uji normalitas data ini menggunakan analisis grafik dengan menggunakan *normal probability plot*. Apabila plot atau titik-titik yang muncul pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas atau data yang kita gunakan telah terdistribusi normal. Sebaliknya apabila titik-titik yang muncul pada grafik menyebar tidak beraturan maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil pengujian normalitas dengan analisis grafik :



Gambar 5.7

Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Normal P-P Plot of Regression  
Standardized Residual



Dari hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan grafik *normal probability plot* dapat dilihat bahwa titik menyebar dan mengikuti arah garis diagonal sehingga analisis model regresi layak digunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dari garis diagonal.

Untuk lebih memperkuat hasil penelitian bahwa model persamaan regresi ini terdistribusi secara normal maka selanjutnya dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika  $K_{hitung} < K_{tabel}$  atau nilai  $Sig > \alpha$ . Berikut hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov :

**Tabel 5.5**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		<b>Unstandardi zed Residual</b>
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,25287548
	Absolute	,193
Most Extreme Differences	Positive	,193
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		,609
Asymp. Sig. (2-tailed)		,852

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: Data diolah Menggunakan SPSS*

Berdasarkan hasil pengujian di atas, terlihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar  $0,852 > 0,05$ . Sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak. Hal ini berarti bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

### 5.3.5 Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak. Hasil uji linieritas dengan menggunakan metode Ramsey adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.6**  
**Uji Linieritas dengan Ramsey**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,991 <sup>a</sup>	,983	,969	,33927

a. Predictors: (Constant), LNX4, LNX2, LNX1, PERTUMBUHAN EKONOMI

b. Dependent Variable: IPM

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 <sup>a</sup>	,999	,998	,07916

a. Predictors: (Constant), DFFIT, LNX2, LNX1, LNX4, PERTUMBUHAN EKONOMI

b. Dependent Variable: IPM

*Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS 20*

Berdasarkan output persamaan regresi pertama diperoleh  $R^2$  old sebesar 0,983, sedangkan pada persamaan regresi kedua diperoleh nilai  $R^2$  new sebesar 0,999. Dengan demikian besarnya nilai F hitung dapat diperoleh, yaitu sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(R^2_{New} - R^2_{Old})/m}{(1 - R^2_{New})/(n - k)} = \frac{(0,999 - 0,983)/1}{(1 - 0,999)/(10 - 5)} = 16,56$$

Karena nilai F hitung (80) > F tabel (3,52) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah linier.

#### 5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan penelitian telah diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran

pemerintah bidang kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, selain itu jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

Dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut:

**a. Implikasi Kebijakan terhadap Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti secara parsial menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara langsung memberikan pengaruh pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, pada penelitian ini sudah menemukan apabila anggaran pendidikan di tambah sebanyak 1% maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,982%. Maka pemerintah Kabupaten Pasaman harus dapat mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi anggaran yang disediakan pada tahun-tahun sebelumnya, karena semakin banyak dana yang diberikan terhadap bidang pendidikan akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman semakin cepat.

Peningkatan anggaran pendidikan dituangkan kedalam berbagai program khususnya program peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program belajar 12 tahun, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah,



peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan program formula untuk indikator penerima beasiswa yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**b. Implikasi Kebijakan terhadap Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti secara parsial menunjukan bahwa kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara langsung tidak memberikan pengaruh pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

Untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan anggaran kesehatan secara tepat sasaran, efektif dan transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang akan menyebabkan kerugian pada daerah, sehingga peningkatan anggaran tersebut bisa menciptakan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk peningkatan program perbaikan gizi bayi, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program pengembangan lingkungan sehat, program standarisasi pelayanan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, program peningkatan alat-alat perawatan, program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan sebagainya.

**c. Implikasi Kebijakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung memberikan pengaruh pada kenaikan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman. Untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman secara cepat pemerintah daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, karena penelitian ini sudah menemukan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 1% maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 2,565%.

Kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia adalah mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada sektor yang potensial dan lebih memprioritaskan untuk pengembangan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di Kabupaten Pasaman.

**d. Implikasi Kebijakan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman. Hal ini berarti secara parsial menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin secara langsung memberikan pengaruh pada kenaikan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasaman. Untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten



Pasaman pemerintah daerah harus berusaha mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun-tahun sebelumnya, karena penelitian ini sudah menemukan apabila jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1% maka akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 2,233%.

Upaya kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kinerja Program PNPM mandiri, Bantuan Perumahan miskin, Jamkesmas dan Jamkesko, Bea siswa, KMN, Kredit Usaha Mikro (BLUD), KUR, Pamsimas, Sanimas dan berbagai bantuan serta program terkait lainnya yang disertai iklim usaha yang semakin baik. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik agar dapat menyerap angkatan kerja yang lebih banyak. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut akan dapat menciptakan peningkatan IPM di Kabupaten Pasaman.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman Tahun 2004 hingga 2013, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman dari Tahun 2004 hingga 2013 cenderung mengalami fluktuasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,97%.
2. Perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman dari Tahun 2004 hingga 2013 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar -4,82%.
3. Perkembangan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Kabupaten Pasaman dari Tahun 2004 hingga 2013 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 20,53%
4. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman dari Tahun 2004 hingga 2013 mengalami fluktuasi namun cenderung memperlihatkan tren yang selalu meningkat dengan rata-rata perkembangan sebesar 6,00%.
5. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman dari Tahun 2004 hingga 2013 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar -10,41%.



6. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk miskin secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman, dengan nilai  $f$ -hitung sebesar 72,126 nilai ini lebih besar dari nilai  $f$ -tabel yaitu sebesar 3,52.
7. Sedangkan nilai  $R$  square adalah sebesar 0,991 yang berarti 99,1% tingkat Indeks Pembangunan Manusia di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,09% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Pasaman, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengeluaran terhadap bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman, sebaiknya anggaran di gunakan secara tepat sasaran, efektif, dan transparansi agar pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman bisa lebih cepat.
2. Pemerintah daerah sebaiknya harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara tepat sasaran, efektif dan transparansi agar dana yang dikeluarkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.

3. Pemerintah daerah harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi dengan cara mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada sektor yang paling potensial yang akan memberikan kontribusi dana yang besar bagi PDRB, Karena di lihat dari hasil penelitian variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang berperan lebih dominan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman.
4. Pemerintah daerah harus bisa mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pasaman dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, mengadakan balai latihan kerja (BLK), meningkatkan program jamkesmas, jamkesko, serta bantuan perumahan miskin dan lain sebagainya, karena semakin sedikit jumlah penduduk miskin yang ada maka akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia lebih baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman agar hasil yang di peroleh lebih akurat dan lebih baik dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Astri, Meylina. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.1 No. 1 Maret 2013. ISSN: 2302 – 2663 UNJ: Yogyakarta.
- Azril. 2000. “Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15. No. 1, 2000: 1-14.
- Badrudin, Rudy. 2010. “ Rasio Kemampuan Daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi DIY Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 21. No. 3, Desember 2010: 243-263.
- Baeti, Nur. 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011*. EDAJ. ISSN 2252-6889. UNNES: Semarang.
- Bapedda Kabupaten Pasaman. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2012*.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasaman*, 2004-2013.
- BPS. *Pasaman Dalam Angka 2004-2013*. Kabupaten Pasaman.
- Djojodipuro, Marsudi. 2008. *Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Ginting, Charisma. 2008. *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya*. Universitas Sumatra Utara: Medan.
- Gozhali, Imam. 2013. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 20*, Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.
- Hastuti, Wulan. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1992-2011*. Perpustakaan UNS: Surakarta.

- James, Foster. 2003. *Measuring the Distribution of Human Development: Methodology and an Application to Mexico*. PNUD: Mexico.
- Kuncoro, Mujradjad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Lubis, Adel Zul Akhir. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik terhadap Pembangunan (studi Kasus pada Negara-Negara ASEAN-4)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- M.L Jhingan. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maurizal, Sazli, dkk. 2013. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi. ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 15 Pages Pp. 29-43-29- Volume 1, No. 2.
- Munawawroh. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi*. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol .II, No.03.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009*. EDAJ. ISSN 2252-6560: Semarang.
- Pratowo, Nur Isa. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
- Samuelson dan Nordhaus. *Makro Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Satya. 2000. *A Generalized Human Development Index*. Manuscript. No 9165, Jakarta
- Setiawan, Mohamad Bhakti 2008. *Indek Pembangunan Manusia Indonesia*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Sillahi. 2006. *Paradigma Penelitian Dalam Metode Penelitian Sosial*. Bandung; Unpar Press.
- Silappessy. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD*. Jurnal Economia. Vol. 9 No. 1 Politeknik Negri Ambon.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Alfa Beta. Bandung.



- Suliyanto. 2011, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Terjemahan Oleh Yelvi dan Andri Erlangga. Jakarta (On-line).
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Edisi ke-11. Erlangga. Jakarta
- Trimaryani, 2009. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009*. Yogyakarta.
- UNDP. 1990-2009. Human Development Report. UNDP (On-Line), Diakses tanggal 30 Januari 2013.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. *Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat*.

## **LAMPIRAN 1**

### **Data Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013**

Tahun	IPM (%)	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp)	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Rp)	Pertumbuhan ekonomi (%)	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)
2004	67,9	114.253.542.507	13.167.448.185	5,26	73400
2005	69,7	64.646.492.639	9.626.169.039	5,61	36800
2006	70,6	87.513.695.338	19.632.619.783	5,77	45600
2007	71,05	118.625.287.893	20.187.885.231,00	5,92	42800
2008	71,71	148.654.872.365	22.963.563.166,00	6,08	35000
2009	72,32	144.404.856.985	25.683.677.670,00	6,12	30460
2010	72,71	189.360.742.656	26.957.537.209,00	6,14	27800
2011	73,19	252.714.389.547	1.867.678.000,00	6,15	26800
2012	73,78	262.869.763.602	3.941.400.250,00	6,16	24330
2013	74,10	280.805.344.799	6.167.015.795,00	6,13	22150

## **LAMPIRAN 2**

**Data Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2013 setelah di LN**

Tahun	IPM (%)	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Ln)	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Ln)	Pertumbuhan ekonomi (%)	Jumlah penduduk miskin (Ln)
2004	67,9	25,46	23,30	5,26	11,20
2005	69,7	24,89	22,99	5,61	10,51
2006	70,6	25,20	23,70	5,77	10,73
2007	71,05	25,50	23,73	5,92	10,66
2008	71,71	25,72	23,86	6,08	10,46
2009	72,32	25,70	23,97	6,12	10,32
2010	72,71	25,97	24,02	6,14	10,23
2011	73,19	26,26	21,35	6,15	10,20
2012	73,78	26,29	22,09	6,16	10,10
2013	74,10	26,36	22,54	6,13	10,01



### LAMPIRAN 3

#### Hasil Regresi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,991 <sup>a</sup>	,983	,969	,33927

a. Predictors: (Constant), LNX4, LNX2, LNX1, PERTUMBUHAN EKONOMI

b. Dependent Variable: IPM

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	33,208	4	8,302	72,126	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	,576	5	,115		
Total	33,783	9			

a. Dependent Variable: IPM

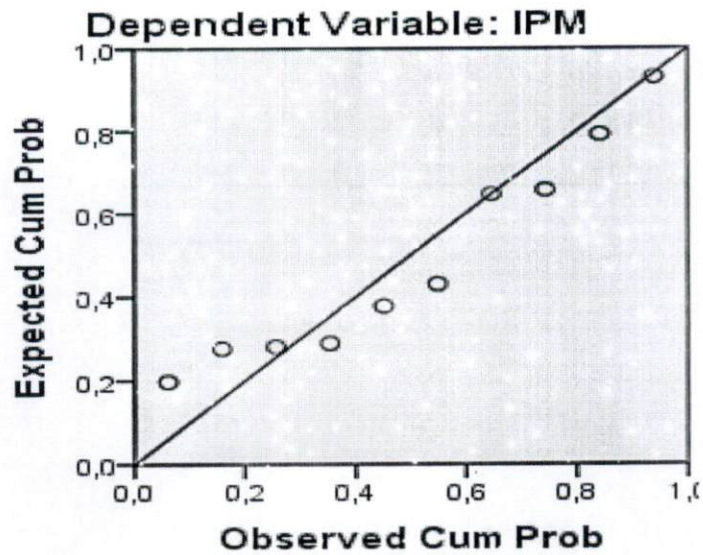
b. Predictors: (Constant), LNX4, LNX2, LNX1, PERTUMBUHAN EKONOMI

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55,411	15,076		3,675	,014
LNX1	,982	,402	,249	2,443	,058
LNX2	-,038	,183	-,018	-,209	,843
PERTUMBUHAN EKONOMI	2,565	1,064	,400	2,409	,061
LNX4	-2,233	,853	-,411	-2,617	,047

a. Dependent Variable: IPM

# Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	55,411	15,076		3,675	,014		
LN <sub>X1</sub>	,982	,402	,249	2,443	,058	,329	3,039
LN <sub>X2</sub>	-,038	,183	-,018	-,209	,843	,471	2,125
1 PERTUMBUHAN EKONOMI	2,565	1,064	,400	2,409	,061	,124	8,080
LN <sub>X4</sub>	-2,233	,853	-,411	2,617	,047	,138	7,225

a. Dependent Variable: IPM

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Mod el	Dimen sion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	LNx1	LNx2	PERTUMBUHAN EKONOMI	LNx4
1	1	4,995	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,004	37,551	,00	,00	,02	,04	,01
	3	,001	72,697	,00	,02	,42	,01	,02
	4	7,781E-005	253,380	,00	,68	,56	,76	,44
	5	3,733E-005	365,812	1,00	,30	,00	,18	,53

a. Dependent Variable: IPM

### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	68,0051	73,8239	71,7060	1,92087	10
Std. Predicted Value	-1,927	1,103	,000	1,000	10
Standard Error of Predicted Value	,175	,333	,232	,063	10
Adjusted Predicted Value	69,8936	73,9237	72,1928	1,36835	10
Residual	-,28915	,50111	,00000	,25288	10
Std. Residual	-,852	1,477	,000	,745	10
Stud. Residual	-1,975	1,754	-,273	1,224	10
Deleted Residual	-2,75002	,70636	-,48679	1,16107	10
Stud. Deleted Residual	-3,765	2,528	-,415	1,757	10
Mahal. Distance	1,495	7,756	3,600	2,458	10
Cook's Distance	,003	12,638	2,235	4,451	10
Centered Leverage Value	,166	,862	,400	,273	10

a. Dependent Variable: IPM